

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA USAR MAPIN
KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA
2020**



**PROGRAM STUDI ILMU
PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA
USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2020**



OLEH:

ERICK SAPUTRA
217130100

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, 2 Februari 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Amil, M.M.
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP. M.IP.
NIDN. 0809039203

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan**



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP.
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA USAR MAPIN
KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020



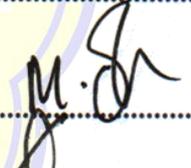
Disusun dan diajukan oleh

ERICK SAPUTRA
217130100

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian Skripsi Pada tanggal 4 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

1. **Drs. Amil, M.M.**
NIDN. 0831126204 (PU)  (.....)
2. **M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP. M.IP.**
NIDN. 0809039203 (PP)  (.....)
3. **Drs. Mintasrihardi, M.H.**
NIDN. 0830016101 (PN)  (.....)

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ERICK SAPUTRA

Nim : 217130100

Dengan ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 04 Februari 2021



ERICK SAPUTRA
217130100



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERICK SAPUTRA
 NIM : 217130100
 Tempat/Tgl Lahir : Hijrah 24-11-1998
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 087751022935 / ericksaputra@gmail.com
 Judul Penelitian : -

Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di Desa Ugar Marin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 509 569 509

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 11-02-2021

Penulis



ERICK SAPUTRA
 NIM. 217130100

Mengetahui,
 Kepala

Iskandar, S.Sos., M.A.
 MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERICK SAPUTRA
 NIM : 217130100
 Tempat/Tgl Lahir : HIRAN 24-11-1998
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 009751022935
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Pemerintah Desa Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Desa Di Desa USAR MAPIN Kecamatan ALAS BARAT Kabupaten Sumbawa

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 11-02-2021

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ERICK SAPUTRA

NIM. 217130100

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTO

**ORANG BERILMU DAN BERDADAB TIDAK AKAN DIAM DI KAMPUNG
HALAMAN TINGGALKAN NEGERIMU DAN MERANTAULAH KENEGERI
ORANG MERANTAULAH, KAU AKAN DAPAT PENGGANTI DARI KERABAT
DAN KAWAN BERLELAH-LELAHLAH, MANISNYA HIDUP TERASA
SETELAH BERJUANG AKU MELIHAT AIR MENJADI RUSAK KARENA
DIAM TAKTERTAHANKAN JIKA MENGALIR MENJADI JERNIH, JIKA
TAKKAN KERUH MENGENANG**

(IMAM SYAFI: 767-820)

**SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH KEADAAN SUATU
KAUM HINGGA MEREKA MENGUBAH KEADAAN YANG ADA PADA DIRI
MEREKA SENDIRI**

(Q. S AR- RA'DU: 11)

**SUKSES BUKANLAH AKHIR DARI SEGALANYA, KEGAGALAN
BUKANLAH SESUATU YANG FATAL, NAMUN KEBERANIAN UNTUK
MENERUSKAN KEHIDUPANLAH YANG DIPERHATIKAN.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan:

Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Zaenal Abidin dan Ibu saya Saiyah Terima kasih untuk perjuangannya, pengorbanannya, motivasinya, perhatiannya, bimbingannya dan doa buat anaknya tercinta, serta buat:

- 1. Kaka tercinta:
Helmisyah yang telah memberi motivasi dan doanya**
- 2. Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, perhatian dan doanya.**
- 3. Teman-teman Seperjuangan Universitas Muhammadiyah Mataram Angkatan 2021, khususnya kelas C Ilmu Pemerintahan terima kasih untuk semua waktu, kenangnya, motivasi dan bantuannya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur, penulis panjatkan pada Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala do'a dan harapan. Hanya kepada rahmat, hidayah, dan keridhaan-Nya lah penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan, dan kemudahan untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini, sebagai syarat memenuhi persyaratan yang diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip) penyusunan penelitian Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan Proposal Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam tugas akhir.

Penulis sangat menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala kerendahan hati penulis memberanikan diri dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, koreksi, saran, dan kritikan yang sifatnya membangun penulis hargai demi kesempurnaan Proposal Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karen itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali M.SI Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP. M.IP Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Amil, M.M Selaku Dosen Pembimbing I yang telah

memeberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada Penulis Dalam menyelesaikan Proposal ini.

5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP, M.IP Selaku Dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan bebagai macam saran dan kritikan sehingga penulisan proposal ini berjalan dengan lancar.
6. Orang Tua penulis yang sudah memberikan Do'a, Motivasi serta dukungan semangat bagi penulis agar dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah memberikan masukan, Dorongan serta semangat motivasi kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan Do'a dan dukungan hingga dapat terselesainya proposal ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang telah disusun dalam proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca pihak lain yang berkepentingan dan dapat memberi sumbangan bagi almamter tercinta.

Mataram 10 November 2020
Penulis

Erick saputra
217130100

ABSTRACT

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA 2020

(Studi di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupate Sumbawa)

Oleh

ERICK SAPUTRA

217130100

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dan peran pemerintah Desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa, Kepala Desa, sekretaris Desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat.

Hasil penelitian ini bahwa partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah Desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin Bahwa pembangunan infrastruktur dari pemerintah Desa yang ada pada perencanaan pembangunan 2020 adalah, Pembangunan perbaikan jalan Gang, Pembuatan Talud, gorong-gorong, perbaikan kantor Desa dan pngerasan jalan atau pengaspalan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya. Dalam pembangunan infrastruktur Desa Usar Mapin masyarakat dilibatkan melalui MUSDES. Nanti di Musdes usulan-usulan masyarakat masuk di dalamnya. Setelah musyawarah Desa kemudian dilanjutkan dengan Musrenbangdes yang secara otomatis melibatkan masyarakat. Musdes ini merupakan usulan dari bawah yang melibatkan semua masyarakat, RT. Faktor penghambat partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah Desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin adalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin adalah pembangunannya itu tidak tepat seperti pada waktu yang sudah di tentukan, warga yang majemuk, sangat banyak dan dapat dikatakan semua warga menginginkan wilayahnya dibangun. Kendala lainnya yaitu letak wilayah masing-masing Dusun yang tidak satu tempat, sehingga dalam pelaksanaan pembangun n akan memakan waktu yang cukup lama dikarnakan letak wilayah yang tidak satu tempat.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pembangunan, Partisipasi masyarakat

ABSTRACT

THE VILLAGE GOVERNMENT'S FUNCTION IN INCREASING COMMUNITY ENGAGEMENT ON VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMS OF USAR MAPIN VILLAGE, ALAS BARAT, SUMBAWA 2020 (Study in Usar Mapin Village, Alas Barat District, Sumbawa Regency)

By
ERICK SAPUTRA
217130100

This study aims to examine the mode of community involvement and the role of the government in the infrastructure development process in Usar Mapin Village, Alas Barat District, Sumbawa Regency and to determine the inhibiting factors and supporting factors for community participation and the role of the Village government in the infrastructure development process in Usar Mapin Village, Alas Barat, Sumbawa.

This style of analysis is descriptive qualitative. The subjects of this research were the village population, the village head, the village secretary, the Village Consultative Body (BPD) of Usar Mapin Village, Alas Barat District.

The findings of this study show that the involvement and role of the society, the village government in the infrastructure development process in Usar Mapin Village, that the infrastructure growth of the local government is in the 2020 development plan is as follows; Building and maintenance of Alley paths, Rendering Taluds and culverts, restoring Village offices and paving roads and other infrastructure development. In the infrastructure growth of Usar Mapin Village, the group is engaged through MUSDES. Then the Musdes group suggestions are used. After the Village deliberation, it is followed by a Musrenbangdes which immediately involves the party. This Musdes is a suggestion from below which involves all the group. The inhibiting factor for community engagement and role, the Village government in the process of infrastructure development in Usar Mapin Village is the implementation of infrastructure development in Usar Mapin Village, the building is not acceptable as at the stated time, the inhabitants are different, very many and it can be assumed that all residents wants the territory constructed. Another challenge is the location of the area of each hamlet which is not in one place, so that the execution of the construction would take such a long time because the area is not in one place.

Keywords: *Village Government, Development, Community Participation*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
Kajian Teori	16
2.1.1 Pemerintah Desa	16
2.1.2 Teori Peran Pembangunan Desa.....	19
2.1.3 Partisipasi Masyarakat.....	21
2.2 Pembangunan	23
2.2.1 Pengelolaan Dana Desa	24
2.2.2 Sumber Daya Manusia	26
2.2.3 Infrastruktur	28
2.3 Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	32

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	32
3.3 Sumber Data.....	32
3.3.1 Data Primer.....	33
3.3.2 Data Sekunder	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4.1 Observasi (<i>non partisipacion</i>	34
3.4.2 Wawancara	34
3.4.3 Dokumentasi.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1 Sejarah Desa Usar Mapin.....	47
4.1.2 Topografi Desa Usar Mapin	51
4.1.3 Demografis Desa Usar Mapin.....	52
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	66
4.2.1 Peran Pemerintah Desa Usar Mapin dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat Melalui kegiatan Seminar di Tingkat Desa	66
4.2.2 Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Penyerapan Aspirasi secara langsung	69
4.2.3 Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar Pembangunan.....	72
4.2.4 Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat melalui sosialisasi Berkelanjutan.....	74
4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat.....	78
4.3.1 Faktor Pendukung	78
4.3.1.1 Masyarakat melek Informasi	78
4.3.1.2 Pola Hubungan kerja Sama antara Pemerintah dan Masyarakat.....	79
4.3.2 Faktor Penghambat.....	80

4.3.2.1 Letak Wilayah yang Jauh	80
---------------------------------------	----

4.3.2.2 Adanya Aktor-aktor Kepentingan	81
--	----

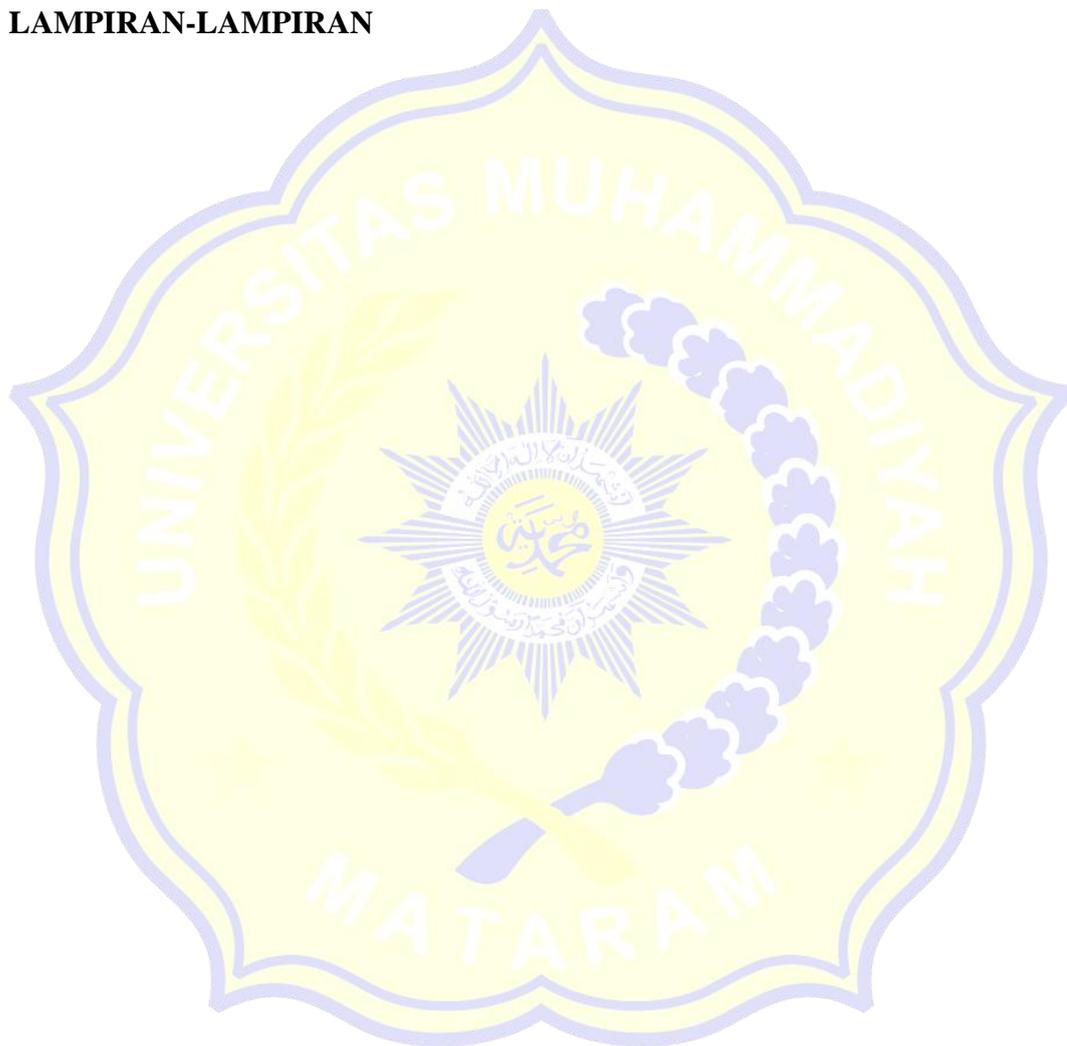
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	83
---------------------	----

5.2 Saran.....	84
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seiring dengan luasnya kebebasan demokrasi di Indonesia, kini mulai terjadi perubahan paradigma pembangunan pendekatan *Top Down*, artinya dimana segala sesuatu di putuskan dari atas mulai di tinggalkan. Setiap kebijakan kini semakin mengakomodir suara masyarakat, sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Karena pendekatan pembangunan tidak lagi menggunakan pendekatan *top down* tapi menggunakan pendekatan *Bottom up* yakni pendekatan perencanaan pembangunan desa dari bawah ke atas yaitu perencanaan pembangunan desa yang di buat oleh pemerintahan desa bersama lembaga kemasyarakatan desa (LPM) dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Pembangunan yang berorientasi pada Pembangunan manusia, Dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan Partisipasi Masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini Akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan Akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Oleh karenanya salah satu

indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Demikian pula pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk meningkatkan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Disini masyarakat perlu diberikan Empowerment (memeberikan kemampuan atau keberdayaan) dan partisipasi dalam pengelolaan pembangunan (Tarsila 2015: 790)

Dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Dalam pendekatan partisipasi, peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatan yang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya kemampuan-kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung pada orang lain ketika masyarakat kuat, peran orang luar semakin dikurangi. Itulah

sebabnya pendekatan partisipatif disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat (Sarifah 2016: 55).

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang Merupakan jawaban untuk mengembalikan dan mengembangkan Otonomi asli Desa, melalui Penegasan kembali terhadap keragaman (ununiformitas) Desa. Undang-Undang Desa menempatkan status Desa sebagai badan hukum yang tersendiri yang terkait dengan pemerintahan Negara. Pemerintahan Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi dengan persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Desa telah di anggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom up*, dimana semua rencana dan relasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, dalam kondisi ini masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannnya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri , pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Hal ini di dorong oleh pengalaman bahwa sebagian masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memeperhatiakn prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (grasroots) memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi

manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering muncul dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan dimasa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. (Dahlan dkk 2012 :44)

Idealnya pembangunan desa memiliki ikatan yang sangat kuat, baik karena kesamaan kepentingan politik, ekonomi, social, dan keamanan. Namun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam program-program Pembangunan Tidak mudah seperti yang dibayangkan. Partisipasi merupakan sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Keberhasilan pembangunan diperlukannya partisipasi awal dan nyata baik itu dimulai dari pemangku kepentingan dalam pembuatan rancangan kegiatan pembangunan, maupun masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan tersebut.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi, adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi

kerja sama untuk manfaat bersama. Oleh karena itu dalam Pembangunan Desa Masyarakat harus mempunyai peran penting dalam proses Pembangunan Desa sehingga menumbuhkan keswedayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dan didalam Pembangunan Desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga Sumber Daya yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu pembangunan Akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan di manfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, Wajib diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan samapai pada hasil akhir Pembangunan tersebut.

Ada banyak hal tentang pembangunan Desa termasuk salah satunya adalah pembangunan Infrastruktur Desa, infrastruktur perdesaan merupakan sebagai Infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Pada umumnya pembangunan infrastruktur Desa dilakukan secara bersama Oleh Masyarakat sekitar dan pemerintah Desa. Dimana keikutsertaan dalam Partisipasi Pembangunan, didasarkan pada solidaritas Masyarakat yang bersifat mekanis, serta lebih mementingkan kepentingan bersama. Sebagaimana yang menjadi perhatian Durkheim dalam nentuk solidaritas masyarakat yang ditulis oleh George Ritzer sebagai berikut “Suatu Masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanik bersatu karena semua orang adalah generalis. Ikatan diantara orang-orang itu ialah karena mereka terlibat dalam

kegiatan-kegiatan yang mirip dan mempunyai dan mempunyai tanggung jawab-tanggung jawab yang mirip “.

Pembangunan-pembangunan infrastruktur sendiri dilakukan dengan melakukan musyawarah yang melibatkan kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala bagian pembangunan desa (BPD), kepala Dusun, serta perwakilan warga masyarakat. Stone mengemukakan bahwa infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan Ekonomi. Oleh karena itu perlunya peran aktif pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka tujuan pembangunan yang harus di capai adalah meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam mendukung tujuan tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat

dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya ditingkat desa.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu Elemen Proses pembangunan Desa sehingga Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak diantaranya yakni Pemerintah Desa sehingga adanya keterlibatan Pemerintah Desa besar kemungkinan masyarakat Akan merasa diberikan peluang atau kesempatan Untuk ikut serta Dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi Sumber Daya atau bekerja sama Dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program Pembangunan dan Evaluasi program pembangunan. Partisipasi Masyarakat juga dianggap sebagai keikutsertaan masyarakat Dalam proses pengidentifikasian Masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan Upaya mengatasi masalah dan keterlibatan Masyarakat Dalam proses Evaluasi yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana Dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset untuk kesejahteraan bersama. Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengakomodasi berbagai

partisipasi masyarakat dalam materi muatannya sebagai bentuk pengakuan Terhadap Otonomi Desa mengingat selama ini Dalam berbagai macam Undan-Undang yang mengatur tentang Desa, Partisipasi Masyarakat tidak diakomodasi. Terdapat tiga bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan Desa yang mandiri sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan Desa.

Terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa, yang dalam hal ini adalah Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur masih terdapat masalah atau masih terdapat kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu sumber daya manusia (SDM) yang lemah atau Masyarakat yang kurang respon, masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan pembangunan baik dari pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya, kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut terjun langsung untuk membantu pemerintah, kurangnya sifat gotong royong sehingga Dalam Pembangunan tidak berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Terkait kondisi kondisi demikian, diperlukan Strategi Pemerintah Desa untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya Pembangunan dalam suatu Desa baik Pembangunan infrastruktur maupun Pembangunan Sumber Daya manusia (SDM).

Strategi pemerintah Desa dalam hal ini adalah sebagai dinamisor, dimana pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan Bimbingan, pengarahan dan mengajak Masyarakat Dalam berpartisipasi aktif dalam Setiap Pembangunan yang dilaksanakan. Strategi pemerintah tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan Desa dapat tampak yaitu dengan adanya peningkatan partisipasi dalam hal Sumber Daya, dalam hal administrasi dan kordinasi, serta partisipasi dalam program pembangunan. Pada pelaksanaan program pembangunan, diharapkan masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, harta, barang material, informasi dan ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ Peran Pemerintah Desa Dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam program pembangunan Desa di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa tahun 2020 “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis didalam melakukan suatu penelitian ini dapat mengambil rumusan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa?

2. Faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimanakah Peran pemerintah Desa Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa 2020.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa 2020.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan diadakannya kegiatan penelitian ini yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat atau kegunaan bagi bebrapa pihak yang memerlukan. Pihak-pihak yang di maksud adalah:

1. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat di pakai sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat setempat atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pihak pemerintah untuk dapat

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan guna tercapainya tujuan pemerintah dalam pelayanan dan pembaangunan desa kepada masyarakat. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini yang disusun dalam bentuk skripsi, diharapkan dapat menambah jumlah kepustakaan yang ada di lingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Sehingga dengan demikian dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan kajian dan sumber informasi bagi peneliti lainnya yang ingin menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Scara Akademis

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis penulis dapat memperoleh pengalaman yang nyataa dalam membandingkan antara teori yang di dapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat memperluas wawasan pengetahuan khususnya pada masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan juga sebagai syarat untuk memeperoleh gelar sarjana pada program ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir Sama dengan peneliti ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1. Desma yulindra mahasiswa jurusan sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Sriwijaya tahun 2013 dengan judul “ peranan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB (pajak bumi dan bangunan) di balai desa karya baru Kecamatan alang-alang lebar Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat agar berkontribusi dalam program PBB (pajak bumi dan bangunan). Hal ini dikarenakan masyarakat dan kepala desa saling berkontribusi dan mendukung serta merealisasikan program tersebut dengan respond dan antusiasime dengan bagus. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat berkontribusi banyak terhadap program PBB adalah kesadaran diri yang tertanam dalam diri masyarakat Akan pentingnya membayar PBB untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri seperti meningkatkan potensi masyarakat di samping sumber daya alam yang ada.
2. Kinerja pemerintah desa Dalam pembangunan infrastuktur di desa kuala lapang dan desa Taras kecamatan malinau barat kabupaten malinau (Maya Rosaliana 2013:106-120).

Penelitian yang dilakukan Maya ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, teknik analisis data model interaktif milik milles dan huberman.

Teori yang digunakan adalah kinerja, dengan fokus kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian yang diperoleh Menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintah desa. Untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif, perlu adanya partisipasi masyarakat yang proaktif untuk mendukung pembangunan di desa.

3. Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat Dalam program desa siaga didesa bandung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa yogyakarta (Nuring septyasa Laksana:2013).

Tujuan Nuring Septyasa melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Nuring menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dasar teori good governace dan teori partisipasi. Teori partisipasi menggunakan teori bentuk partisipasi Huraerah, yakni: partisipasi berupa buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan & kemahiran, dan sosial.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari partisipasi warga yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat desa, kader desa, serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Desa Siaga meliputi tenaga, sumbangan harta, dan pemikiran.

4. Peranan Pemerintah Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Studi kasus di desa Mantang besar Kecamatan mantang Kabupaten Bintan) (kasmir:2014:105).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di desa mantang besar, mengetahui Bentuk-Bentuk partisipasinya, serta mengetahui Faktor-faktor partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis Deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran pendekatan soerjono soekanto.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran Pemerintah desa mantang Besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan sudah baik. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam musrenbang dan partisipasi fisik dalam pelaksanaan Pembangunan. Faktor penghambatnya adalah dari tingkat kesadaran masyarakat, tingkat

pendidikan masyarakat, sikap mental masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat.

5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan sungai keledang Kecamatan samarinda seberang Kota samarinda (Hendryk 2013: 612-625)
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari Partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian sebelum Undang-Undang Desa disahkan. Sementara saat ini Undang-Undang desa telah disahkan dan di dalamnya diatur bahwa proses pembangunan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa orisinitas penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya terletak pada Setting penelitian saja, yakni waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahsan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa, adanya pembagian bahasan dan tahap pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), serta digunakan Undang-Undang Desa tahun 2014 yang disahkan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topic yang hampir Sama dengan peneliti ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Desma yuliandra, 2013	Peranan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB(pajak bumi dan bangunan) di balai desa karya baru kecamatan alang-alang lebar Palembang.	Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat agar berkontribusi dalam program PBB (pajak bumi dan bangunan). Hal ini dikarenakan masyarakat dan kepala desa saling berkontribusi dan mendukung serta merealisasikan program tersebut dengan responden dan antusiasisme dengan bagus.
2	Maya Rosaliana, 2013	Kinerja Pemerintah	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa dalam

		Desa Dalam pembangunan infrastruktur di desa kuala lapang dan desa taras kecamatan malinau barat kabupaten Malinau	Pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah Desa.
3	Nuring septiyasa, 2013	Bentuk- Bentuk partisipasi masyarakat Dalam program Desa siaga di desa bandung kecamatan playen kabupaten Gunung kidul provinsi	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Program Desa Siaga di Desa Bandung kecamatan Playen kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah istimewa yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari partisipasi Warga yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat Desa, kader desa, serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi.

		Daerah istimewa Yogyakarta.	
4	Kasmir, 2014	Peran pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan (studi kasus di Desa mantang besar kecamatan mantang kabupaten Bintan	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran pemerintah desa mantang Besar Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah baik. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam musrenbang dan partisipasi fisik dalam pelaksanaan Pembangunan.
5	Hendryk,2013	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif

		di kelurahan sungai keledang kecamatan samarinda seberang kota samarinda.	masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
--	--	---	---

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Peemerintah Desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya system pemerintahan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Hirarki pemerintah di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau Kota sampai Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, system pemerintah desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, dan kemudian diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa dengan segenap atribut pemerintahnya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat kepala desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa

bertanggung jawab pada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya kepada bupati melalui Camat. Selain BPD di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa, lembaga yang dimaksud merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan ini dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa dan mengenai jumlah serta komposisi kepengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan ini merupakan mitra pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Aparatur pemerintah Desa Sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah Desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah Desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

1. Sebagai dinamisator: tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
2. Sebagai katalisator; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
3. Sebagai Pelopor ; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi(loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat (Mondong 2013: 1).

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa dipimpin Oleh kepala desa dan dibantu oleh pemerintahan, yang sesuai dengan bidang masing-masing yang disebut perangkat desa. Dibentuk juga badan permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan lembaga perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah ditingkat desa. Disamping itu, juga pemerintah

memeberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia pasal 1 ayat 6, menyatakan bahwa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya urusan pemerintahan yang ada di desa. Dengan demikian, seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintah dan pembangunan di dalam wilayahnya, disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan program dibidang kemasyarakatan, membina ketentraman dan keterlibatan masyarakat serta membina menngembangkan jiwa semangat gotong royong masyarakat.

2.2.2. Teori Peran Pembangunan Desa

Peran merupakan aspek yang dinamis Dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan Hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu Peran.

Teori yang mendukung Penelitian ini adalah *role Theory* (Teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang di tempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba Untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Setiap Peran adalah seperangkat Hak, Kewajiban, Harapan, Norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi Dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat di simpulkan bahwa Peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

Pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan Desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian maka

pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, Akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan Desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa. Pengerahan Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*Empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Berkaitan dengan teori peran pembangunan diatas maka yang saya gunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sidoarjo: Zifatma Publishing 2013: 34).

2.2.3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses Perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagai

manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Ketentuan partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan perubahannya, yaitu pasal 354 Bab XIV mengenai partisipasi masyarakat. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bentuk partisipasi masyarakat berupa konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat dalam partisipasinya dapat berfungsi menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Kaho (dalam Juraidh, 2016) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari empat jenjang yaitu : partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi.

Berikut bentuk-bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan setiap warga masyarakat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
- d. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa, merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak

hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor internal

Menurut Slamet (2003:137-143), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti Usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Sedangkan

2. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu

Dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.3. Pembanguna Desa

Suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, secara sadar negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Satka 2015: 1863-1876). Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan. Tujuan dari dilakukannya pembangunan antar lain: keadilan sosial, kemakmuran yang merata, perlakuan sama dimata hukum, kebahagiaan mental, spiritual dan material, kebahagiaan untuk semua kalangan, serta ketentraman dan keamanan (Juraidah 2015:1145-1157).

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan Desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan suatu yang baru dalam arti

fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, Akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

2.3.1 Pengelolaan Dana Desa

Otonomi Daerah sangat mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu sumberdaya dari Desa sendiri maupun dari luar. Salah satu

sumberdaya dari Desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa yaitu alokasi dana dari pemerintah Daerah yang disebut alokasi Dana Desa. Adanya alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber daya penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di Desa. Salah satu hal yang penting untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan Alokasi Dana desa (ADD).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang

diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (mohammad mashun,2006: 20 (20), 1-21).

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Sumber pendanaan desa adalah berasal dari APBN yang merupakan sumber pembiayaan ditujukan untuk dapat ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan dipergunakan dalam melakukan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa harus dimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.3.2 Sumber daya manusia

Manusia sebagai sumber daya bagi suatu organisasi tidak sama karakteristiknya dengan Sumberdaya alam dan finansial. Sumber daya manusia sebagai ciptaan tuhan yang maha esa adalah makhluk yang konflik dan keterpaduan tubuh dan jiwanya, yang tidak dapat dilakukan sebagaimana kedua sumber lainnya dalam kegiatan bisnis. Suatu organisasi harus memiliki suatu sumber daya manusia yang kompetitif, sehingga tak mengalami kemunduran. Oleh karena itu perlu dilakukan salah satu kegiatan secara berencana dan berkelanjutan untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Pengembangan Sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh,

cerdas dan terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, disiplin dan orientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membentuk para masyarakat agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam pembangunan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien yang berfokus pada usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan esistensi dalam suatu Desa.

Selanjutnya, Notoatmodjo 2008:195-199) mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu peningkatan gizi serta peningkatan aspek non fisik melalui akumulasi bidang pendidikan dan latihan. Hal yang Sama juga ditekankan oleh prjono (1996: 34), bahwa perlu investasi pada masyarakat melalui program pendidikan pelatihan dan gizi/kesehatan, agar masyarakat dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Dalam pembangunan ekonomi suatu Desa melibatkan faktor-faktor yang berperan penting, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). Keadaan SDM suatu Desa sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi Desa tersebut. Untuk dapat mempercepat tingkat pembangunan ekonomi maka diperlukan SDM yang unggul diberbagai bidang. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia (SDM), yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani dan kejuangan maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat.
2. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
3. Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan.
4. Pengembangan pelantara yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan anata lain, sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja dan sektor-sektor pembangunan lainnya (mulyadi S 2003: 71).

2.3.3 Infrastruktur

Infrastuktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan ekonomi sektor privat, sabagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas anatar lain dapat berupa jalan, bandara, waduk, dan pelabuhan

secara fungsional, infrastruktur selain fasilitas akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, istilah infrastuktur termasuk pula infrastuktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit. Bila dalam militer istilah ini dapat merujuk pada bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan tersebut, infrastuktur sama saja dengan prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan prnunjuk utama terselenggaranya suatu proses (Latif, Adam 2019: 1-15).

Jenis-Jenis Infrastruktur:

1. Infrastruktur Keras (Physical hard infrastucture)

Meliputi jalan raya dan kereta api,dermaga, bandara, pelabuhan dan saluran irigasi.

2. Infrastruktur keras non-fisik (Non-physical hard infrastucture)

Yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum, seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyalur, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telpon dan internet), dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, dan gas berikut pipa distribusinya.

3. Infrastruktur Lunak (soft infrastructure)

Bisa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja) norma (khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan

hukum dan perundang-undangan) serta kualitas pelayan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

2.4. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan penulis dalam rangka penyusunan rencana penelitian ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah yang sedang disorot.

Nuring septyasa laksana (2013:1). “Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam program desa siaga di desa bandung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam program desa siaga. Dalam penelitiannya nuring septyasa menggunakan deskriptif kualitatif dengan dasar teori Good governance dan Teori partisipasi. Teori partisipasi menggunakan bentuk teori huraerah yakni, partisipasi berupa pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, kemahiran dan sosial.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa program desa siaga di desa Bandung Kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari partisipasi warga yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat desa serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat desa bendung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi yogyakarta dalam program desa siaga meliputi tenaga, sumbangan harta dan pemikiran.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masyarakat Dalam program

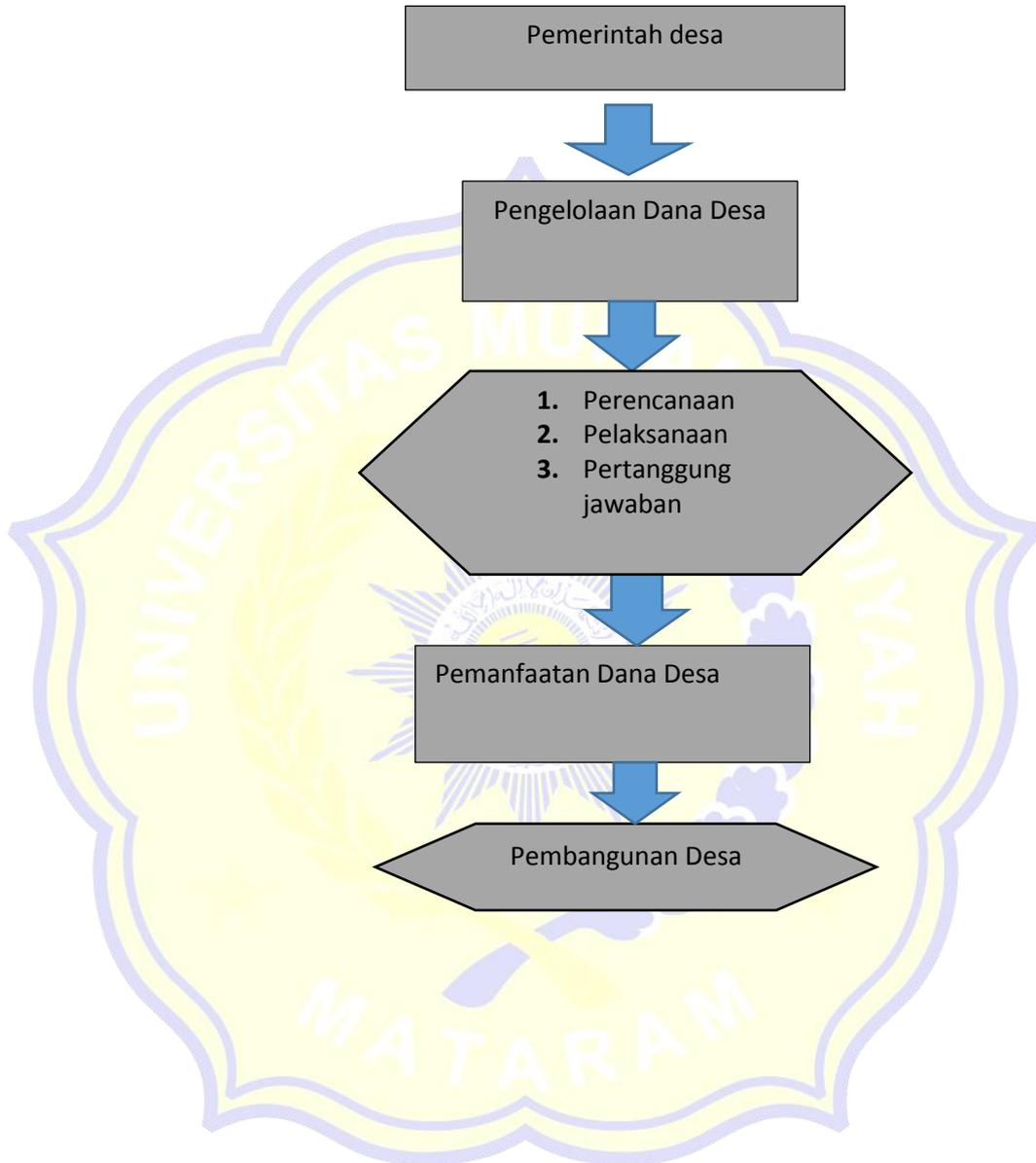
pembangunan desa di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa 2020”. Peneliti yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam memaparkan peran yang dilakukan pemerintah desa Usar Mapin, peneliti menggunakan teori dari (Dahlan dkk,2012: 44) tentang peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah sudah optimal peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.

Dalam proses pembentukannya, pemerintah desa serta aparat-aparat desa lainnya sangat mempunyai peran penting dalam pembangunan desa, serta keterlibatan masyarakat pastinya sangat dibutuhkan dalam proses program pembangunan tersebut baik dari segi fisik maupun non fisik, pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien, dan tentunya sesuai dengan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka berpikir penelitian dapat digambarkan pada skema di bawah ini

Bagan Kerangka Berfikir

Gambar kerangka Berpikir 2.4



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap menggunakan analisis data kualitatif.

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini peneliti pengacu pada lokasi yaitu, Desa Usar mapin. Desa Usar mapin adalah desa yang berada di kecamatan alas barat kabupaten sumbawa. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik pada desa Usar Mapin ini adalah Masih kurangnya peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Waktu rencana penelitian dari bulan desember 2020 sampai dengan Januari tahun 2021.

3.3 Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah

dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi Berikut Data yang digunakan:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau strategi penyerapan aspirasi warga Desa setempat. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

3.3.2 Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang di hasilkan dari data ini adalah data sekunder. Seperti penelitian Data-data lain yang dibutuhkan sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, seperti dokumentasi, Undang-Undang, Arsip dan data-data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data peneliti.

Data ini berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data

sekunder yang digunakan peneliti berupa Arsip instansi lembaga legislatif, catatan program penyerapan aspirasi dilapangan, foto-foto kegiatan penyerapan aspirasi, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa peran Pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam program pembangunan Desa di desa usar mapin kecamatan alas barat kabupaten sumbawa 2020.

3.4.1 Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan Peneliti melakukan pengamatan di lapangan dengan mendatangi Kepala desa beserta Stap Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan mencari Data dan Informasi yang dibutuhkan, serta melihat tempat-tempat yang menjadi objek pembangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan. Peneliti akan melakukan pertemuan dengan informan guna melakukan komunikasi langsung melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dengan beberapa informan berbeda baik itu aparatur Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ataupun masyarakat setempat.

Wawancara Responden :

1. Kepala Desa Usar Mapin
2. Sekretaris Desa Usar Mapin
3. Ketua BPD Desa Usar Mapin
4. Kasih Pemerintahan Desa Usar Mapin
5. Kepala Dusun Desa Usar Mapin
6. Tokoh Masyarakat Desa Usar Mapin
7. Ketua Karang Taruna Desa Usar Mapin

3.4.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku Peneliti dalam hal ini mengabadikan suatu kegiatan-kegiatan lapangan yang sedang diteliti. Dalam membuat dokumentasi ini peneliti menyiapkan sebuah kamera

handphone untuk mengabadikan gambar kegiatan yang berlangsung dalam rangka penelitian mengenai peran Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Desa di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Dokumentasi dilakukan agar peneliti dapat memperlihatkan bukti data yang dapat dipertanggung jawabkan.

